

# EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

## EVALUATION OF THE PANCASILA IDEOLOGY DEVELOPMENT PROGRAM OF THE PANCASILA IDEOLOGY DEVELOPMENT AGENCY

Galuh Ibrahim

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA (UPI)  
(galuh.ibrahim@upi.edu)

**Abstrak** – Artikel ini menyajikan hasil evaluasi komprehensif terhadap Program Pembinaan Ideologi Pancasila yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada tahun 2025, dengan tujuan memberikan bukti empiris bagi perbaikan kebijakan dan strategi pelaksanaan program di era digital. Objek penelitian adalah seluruh inisiatif/program edukasi dan kegiatan pembinaan ideologi Pancasila yang diselenggarakan oleh BPIP. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif evaluatif dengan melibatkan 5.356 responden dari 18 provinsi dan 125 kabupaten/kota. Analisis dilakukan berdasarkan Model CIPP (Context, Input, Process, Product) oleh Daniel L. Stufflebeam, yang menekankan evaluasi berorientasi keputusan. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas program secara keseluruhan sangat tinggi, mencapai indeks 85,33%. Analisis CIPP mengungkapkan bahwa program memiliki konteks (Context) yang kuat dan relevan secara nasional, serta proses (Process) pelaksanaan yang sangat efektif, ditandai oleh antusiasme dan partisipasi tinggi (>80%), kualitas fasilitator dan materi yang sangat baik (>85%). Hasil dan dampak (Product) program juga signifikan, terlihat dari peningkatan pengetahuan dan pemahaman (>90%), dampak sosial positif terhadap toleransi dan persatuan (indeks tertinggi 86,31%), serta motivasi perubahan perilaku (>80%). Namun, kajian mengidentifikasi celah pada komponen input, khususnya strategi komunikasi digital BPIP yang belum optimal dan adanya ketidaksesuaian antara preferensi platform digital masyarakat (instagram, TikTok, Facebook) dengan tingkat interaksi pada kanal resmi BPIP yang masih rendah. Rekomendasi utama menekankan perlunya BPIP untuk mengoptimalkan strategi input digital guna memperluas jangkauan dan keterlibatan awal, sambil terus mempertahankan dan memperkuat proses pelaksanaan program yang telah terbukti efektif. Hal ini memerlukan evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian strategi adaptif agar Pancasila tetap relevan dan efektif di tengah dinamika perubahan. Pembatasan kajian meliputi sifat deskriptif kuantitatif, data berbasis persepsi, cakupan wilayah, dan keterbatasan instrumen kuesioner.

**Kata Kunci:** Efektivitas, evaluasi kebijakan, ideologi pancasila, model CIPP, pembudayaan pembinaan

**Abstract** – This article presents a comprehensive evaluation of the Pancasila Ideology Development Program implemented by the Pancasila Ideology Development Agency (BPIP) in 2025, aiming to provide empirical evidence to improve policy and implementation strategies in the digital era. The object of study is all BPIP initiatives/programs and activities for cultivating Pancasila ideology. The research employed a descriptive quantitative evaluative approach involving 5,356 respondents from 18 provinces and 125 regencies/cities. Analysis was conducted using the CIPP Model (Context, Input, Process, Product) by Daniel L. Stufflebeam, which emphasizes decision-oriented evaluation. Results show a very high overall program effectiveness index of 85.33%. CIPP analysis reveals a strong, nationally relevant Context and a highly effective Process, indicated by high enthusiasm and participation (>80%) and excellent facilitator and material quality (>85%). Product outcomes are also significant, seen in knowledge and understanding increases (>90%), positive social impacts on tolerance and unity (highest index 86.31%), and motivation for behavioral change (>80%). However,

*the study identifies a gap in the Input component, notably BPIP's digital communication strategy, which remains suboptimal and misaligned with public platform preferences (Instagram, TikTok, Facebook), resulting in low interaction on BPIP's official channels. The main recommendation stresses the need for BPIP to optimize digital input strategies to broaden outreach and early engagement while maintaining and strengthening the proven effective implementation processes. This requires ongoing evaluation and adaptive strategic adjustments to keep Pancasila relevant and effective amid changing dynamics. Limitations include the descriptive quantitative design, perception-based data, geographic coverage, and questionnaire instrument constraints.*

**Keywords:** Effectiveness, policy evaluation, pancasila ideology, CIPP model, cultivation, , guidance

## Pendahuluan

Globalisasi dan perkembangan teknologi digital menimbulkan tantangan serius bagi pembinaan ideologi Pancasila sebagai fondasi karakter bangsa. Generasi muda terpapar budaya asing, individualisme, serta maraknya hoaks dan ujaran kebencian di media sosial (Ardiana Bulan Ramadhani et al., 2024; Jurgen R. Litualy & Andreas M D. Ratuanak, 2024).

Survei Litbang Kompas–PSKI (2022) menunjukkan hanya 28,6% siswa memahami Pancasila melalui pendidikan formal, sementara 21,7% justru memperoleh pemahaman dari media sosial (Wulansari et al., 2025). Kondisi ini menimbulkan ketidaksesuaian digital, yaitu ketidakselarasan antara preferensi platform populer masyarakat (Instagram, TikTok, Facebook) dengan rendahnya interaksi pada kanal resmi BPIP (Amir et al., 2022; Princessa Dinda Oktaviana et al., 2023).

Objek penelitian adalah program edukasi dan pembinaan ideologi

Pancasila yang dilaksanakan BPIP pada tahun 2025. Pemilihan ini didasarkan pada mandat strategis BPIP sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab memperkuat ideologi Pancasila (Ganjar Razuni & Paisal Halim, 2024), serta urgensi menilai efektivitas program dalam konteks sosial-teknologi yang berubah cepat.

Penelitian terdahulu menekankan pentingnya pembinaan ideologi melalui pendidikan formal dan agama (Dewantara et al., 2019; Ihsan & Fatah, 2021; Yani et al., 2025), namun belum secara komprehensif mengevaluasi strate Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas pembudayaan ideologi Pancasila dengan menggunakan Model CIPP yang dikembangkan Stufflebeam (D. L., Stufflebeam & & Coryn, 2014; D. L. Stufflebeam & & Thomas Kellaghan, 2003). Urgensi evaluasi ini terletak pada kebutuhan memperoleh gambaran komprehensif tentang pelaksanaan program, mengidentifikasi celah pada

strategi komunikasi digital, dan merumuskan rekomendasi adaptif agar Pancasila tetap relevan serta mampu membentuk karakter bangsa di era digital. Diskursus tentang ekosistem algoritma dan kedaulatan digital juga penting untuk memastikan ruang digital Indonesia tidak sepenuhnya dikendalikan logika komersial global, melainkan berpihak pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar etika dan identitas nasional (Zuboff, 2019; Couldry & Mejias, 2019).

Artikel ini disusun pertama menguraikan kerangka teoritik dan studi terdahulu, bagian kedua menjelaskan metode penelitian, bagian ketiga menyajikan hasil dan pembahasan, dan bagian terakhir menyimpulkan temuan utama serta rekomendasi kebijakan.

## **Kajian Literatur**

### **Konsep Ideologi dan Pembudayaan Pancasila**

Ideologi secara teoritik dipahami sebagai seperangkat nilai, keyakinan, dan cita-cita yang menjadi pedoman hidup bersama dalam masyarakat. Dalam konteks pendidikan, ideologi berperan sebagai kerangka normatif yang membentuk pola pikir, perilaku, dan identitas kolektif (Loppies et al., 2025; Vindevoghel, 2016). Max Horkheimer

(2022) menyoroti bahwa pendidikan cenderung mereproduksi ideologi dominan melalui kurikulum, metode pengajaran, dan struktur kelembagaan, sehingga pembudayaan ideologi berlangsung secara sistemik dan terstruktur.

Pancasila sebagai dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia berisi lima prinsip utama: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Yudi Latif (2018) menegaskan bahwa Pancasila merupakan kristalisasi nilai dan cita-cita bangsa yang bersifat universal dan objektif, sedangkan Mujahidah & Dewi (2022) menekankan relevansinya sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi formal, tetapi juga sebagai sumber hukum dan norma sosial yang menjaga persatuan dalam keberagaman.

Konsep *enculturation* merujuk pada proses internalisasi nilai, norma, dan simbol budaya melalui pendidikan formal maupun informal. Vehrer (2024) menjelaskan bahwa proses ini bertujuan membentuk karakter serta identitas individu sesuai dengan nilai-nilai ideal masyarakat. Dalam konteks ideologi negara, Maulida (2023) menekankan

bahwa pembudayaan Pancasila berlangsung melalui keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial sebagai fondasi utama sejak usia dini.

Proses internalisasi nilai-nilai Pancasila memperdalam penanaman sehingga menjadi bagian dari kepribadian dan perilaku individu maupun masyarakat. Hal ini berlangsung melalui pendidikan formal, keluarga, aktivitas budaya, serta interaksi sosial yang konsisten membentuk karakter kebangsaan (Kurniasih & Wakhudin, 2023; Susilawati et al., 2021). Mekanisme utama yang digunakan adalah habituasi, keteladanan, dan integrasi nilai dalam kurikulum maupun kegiatan intra dan ekstrakurikuler, sehingga nilai Pancasila menjadi bagian dari pembiasaan sehari-hari (Lizardo, 2021; Toomela, 1996). Dalam konteks era digital, internalisasi tidak hanya terjadi di ruang fisik, tetapi juga di ruang virtual. Perilaku kewarganegaraan digital (*digital citizenship*) seperti cara berinteraksi di media sosial, menyaring informasi, dan membangun solidaritas daring menjadi arena baru pembentukan karakter kebangsaan. Dengan demikian, internalisasi Pancasila harus diperluas ke ranah digital agar nilai-nilai kebangsaan tetap hidup dan relevan secara virtual

(Nurizka et al., 2020; Pudjiastuti, 2020; Septiani & Kurniawan, 2022).

Di lingkungan sekolah, pembudayaan dilakukan melalui pengelolaan lingkungan fisik dan sosial, internalisasi nilai secara natural dan berkesinambungan. Di dalam masyarakat luas, pembudayaan Pancasila dapat diperkuat melalui tradisi lokal, sebagai upaya penguatan identitas nasional (Caturiasari et al., 2022; Khaedir Hedir & Nurdiyanti, 2025).

Namun, proses ini dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti pengaruh globalisasi yang melemahkan kohesi nilai, kualitas sistem pendidikan yang belum merata, dan kurangnya keteladanan dari figur-figur kunci dalam masyarakat (Mujahidah & Dewi, 2022; Pudjiastuti, 2020).

### **Studi Terdahulu tentang Pembinaan Ideologi Pancasila**

Penelitian terdahulu menegaskan pentingnya pembinaan ideologi Pancasila dalam menghadapi tantangan globalisasi, radikalisme, dan krisis identitas bangsa. Studi di madrasah dan pesantren menunjukkan bahwa penguatan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan agama Islam efektif dalam mencegah radikalisme dan membangun moderasi beragama (Ihsan

& Fatah, 2021; Yani et al., 2025). Implementasi Pancasila dalam pendidikan karakter di perguruan tinggi juga terbukti mampu membentuk integritas, nasionalisme, dan sikap toleran mahasiswa (Dewantara et al., 2019; ZA. Tabrani et al., 2024).

Beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa internalisasi nilai Pancasila masih menghadapi kendala, seperti lemahnya inovasi pembelajaran, kurangnya keteladanan, serta tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam praktik kehidupan sehari-hari (Silalahi & Yuwono, 2018; Syahwaliana et al., 2025). Revitalisasi Pancasila melalui kebijakan nasional, seperti pendirian BPIP dan kurikulum 2013, menjadi langkah strategis untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan kontekstual (Ganjar Razuni & Paisal Halim, 2024; Syahwaliana et al., 2025).

### **Kerangka Teoritik: Nilai, Simbol, Praksis, dan Internalisasi**

Kerangka teoritik pembudayaan ideologi Pancasila meliputi empat aspek utama: nilai, simbol, praksis, dan internalisasi. Nilai Pancasila merupakan inti ideologi yang harus diinternalisasi melalui

pendidikan dan pembiasaan (Dewantara et al., 2019; Maulida et al., 2023).

Simbol Pancasila, seperti lambang negara dan upacara bendera, berfungsi sebagai media visualisasi dan penguatan identitas kolektif (Maulida et al., 2023; Silalahi & Yuwono, 2018). Praksis Pancasila diwujudkan dalam perilaku nyata, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat, melalui pembiasaan, keteladanan, dan partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa (Dewantara et al., 2019; Syahwaliana et al., 2025; ZA et al., 2024).

Era digital, praksis ini juga harus diperluas ke ranah virtual. Digital Praxis merujuk pada bagaimana nilai-nilai Pancasila dipraktikkan saat seseorang berinteraksi di ruang digital, misalnya dalam kolom komentar, diskusi daring, atau ketika menyebarkan konten di media sosial. Praktik digital ini menjadi arena baru pembentukan karakter kebangsaan, di mana nilai toleransi, persatuan, dan keadilan sosial diuji dalam interaksi virtual.

Praksis Pancasila tidak hanya hadir dalam kehidupan sehari-hari secara fisik, tetapi juga dalam perilaku kewarganegaraan digital. Lebih jauh, pada konteks sosial-teknologi pembudayaan Pancasila juga terkait erat

dengan ekosistem algoritma yang membentuk perilaku digital masyarakat. Algoritma media sosial menentukan arus informasi dan preferensi nilai, sehingga memengaruhi cara individu memahami Pancasila. Karena itu, diskursus kedaulatan digital menjadi penting agar ruang digital Indonesia tidak sepenuhnya dikendalikan logika komersial global, melainkan tetap berpihak pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar etika dan identitas nasional. Integrasi perspektif ini memperluas kerangka teoritik dari praksis sosial di sekolah dan keluarga menuju pemahaman sistemik tentang interaksi ideologi dengan teknologi dan algoritma dalam membentuk kewarganegaraan digital yang beretika dan berdaulat.

Internalisasi nilai-nilai Pancasila berlangsung melalui pendidikan formal, keluarga, aktivitas budaya, serta interaksi sosial yang konsisten membentuk karakter kebangsaan. Dalam konteks era digital, internalisasi tidak hanya terjadi di ruang fisik, tetapi juga di ruang virtual. Perilaku kewarganegaraan digital (*digital citizenship*) menjadi arena baru pembentukan orientasi moral dan komitmen kebangsaan. Dengan demikian, internalisasi Pancasila harus diperluas ke ranah digital agar nilai-nilai

kebangsaan tetap hidup dan relevan dalam perilaku masyarakat yang semakin terhubung secara virtual (Santoso et al., 2025; Setiyono & Natalis, 2023; Syahwaliana et al., 2025; ZA et al., 2024).

Revitalisasi Pancasila melalui kebijakan nasional, seperti pendirian BPIP dan kurikulum 2013, menjadi langkah strategis untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan kontekstual (Ganjar Razuni & Paisal Halim, 2024).

Kerangka teoritik ini menegaskan bahwa pembudayaan Pancasila tidak dapat berhenti pada level simbolik atau normatif semata, tetapi harus menyentuh praksis nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nilai, simbol, praksis, dan internalisasi saling melengkapi sebagai satu kesatuan yang membentuk identitas kebangsaan. Dengan demikian, kerangka teoritik ini memberikan pijakan analitis bagi penelitian untuk menilai efektivitas program pembudayaan ideologi Pancasila. Evaluasi berbasis Model CIPP memungkinkan peneliti mengukur sejauh mana nilai, simbol, praksis, dan internalisasi telah diimplementasikan secara nyata, sekaligus mengidentifikasi celah yang masih perlu diperkuat. Hal ini penting agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai ideologi normatif, tetapi juga dihidupi sebagai pedoman

praktis dalam membangun karakter bangsa yang adaptif dan inklusif.

### **Metode Penelitian**

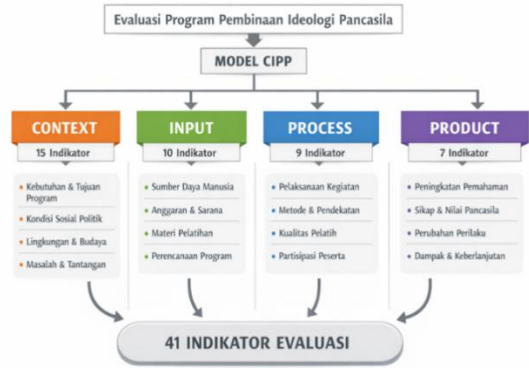
Studi ini menempatkan diri sebagai evaluasi nasional dengan cakupan 18 provinsi dan 125 kabupaten/kota, melibatkan 5.356 responden dari berbagai latar belakang demografi. Kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan Model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) secara menyeluruh untuk menilai efektivitas program pembudayaan ideologi Pancasila, sekaligus mengidentifikasi kelemahan pada komponen Input, khususnya strategi komunikasi digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengukur capaian program, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis agar Pancasila tetap relevan dan efektif di tengah dinamika perubahan sosial dan teknologi.

Lokasi penelitian mencakup 18 provinsi di Indonesia, seperti Sumatera Utara, Jawa Tengah, NTT, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Aceh, Jawa Barat, dan provinsi lainnya. Populasi sasaran terdiri dari individu berusia 15 hingga 65 tahun, yang telah berpartisipasi atau berkolaborasi dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh BPIP.

Pemilihan 18 provinsi dilakukan dengan pendekatan purposive sampling yang mempertimbangkan keterwakilan klaster geografis utama Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali–Nusa Tenggara, dan Papua. Strategi ini memastikan bahwa sampel tidak hanya terkonsentrasi di satu wilayah, tetapi mencakup variasi demografi, sosial, dan budaya dari barat hingga timur Indonesia. Dengan demikian, distribusi responden dari 125 kabupaten/kota di 18 provinsi dapat dianggap cukup proporsional untuk memberikan gambaran nasional yang berimbang. Pendekatan ini memperkuat validitas generalisasi hasil penelitian, karena data mencerminkan keragaman konteks geografis dan sosial yang relevan dengan evaluasi program pembinaan ideologi Pancasila.

Pengumpulan data dilakukan melalui instrumen utama berupa kuesioner terstruktur yang hasil diskusi internal BPIP, terdiri dari 41 indikator dan 7 dimensi yang merepresentasikan aspek efektivitas program. Teknik pengumpulan data meliputi survei langsung yang dilakukan oleh enumerator dan survei daring melalui platform digital, guna menjangkau berbagai kalangan responden.

Gambar berikut adalah visualisasi model yang memetakan 41 indikator secara eksplisit ke dalam komponen CIPP (*Context, Input, Process, Product*).



**Gambar 1.** Evaluasi PKM  
Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

Data ini selanjutnya digunakan untuk analisis persepsi, pengalaman, dan tingkat kepuasan responden terhadap program pembinaan ideologi Pancasila.

Kuesioner survei ini mencakup beberapa dimensi utama, antara lain:

- 1) Kesadaran (*awareness*) dan akses informasi: tingkat pengenalan masyarakat terhadap BPIP dan kemudahan memperoleh informasi melalui media sosial, media elektronik, maupun kegiatan langsung.
- 2) Keterlibatan dan partisipasi komunitas: tingkat antusiasme,

keaktifan, serta rekomendasi terhadap kegiatan pembinaan ideologi.

- 3) Peningkatan kapasitas individu: perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, dan relevansi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
- 4) Kualitas fasilitator dan metode pembelajaran: penilaian terhadap kompetensi narasumber, kejelasan, serta aplikabilitas materi, serta kenyamanan lingkungan kegiatan.
- 5) Dampak sosial dan perubahan perilaku: peningkatan toleransi, semangat kebangsaan, kepedulian sosial, serta penerapan nilai-nilai etika dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat.
- 6) Kepuasan dan keberlanjutan program: persepsi masyarakat terhadap kinerja BPIP dan harapan terhadap kelanjutan program pembinaan ideologi Pancasila.

Berikut adalah tabel indikator yang digunakan dalam penelitian.

**Tabel 1.** Dimensi dan Indikator dalam Penelitian

| Dimensi                       | Indikator                                                | Komponen CIPP                                     |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Awareness dan akses informasi | Pengenalan terhadap BPIP, Kemudahan memperoleh informasi | Context (menilai kebutuhan dan relevansi program) |



|                                 |                                                                 |                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Keterlibatan dan partisipasi    | Keaktifan dalam kegiatan, rekomendasi partisipasi               | Process (memantau pelaksanaan dan partisipasi)    |
| Peningkatan kapasitas individu  | Perubahan pengetahuan, pemahaman, dan relevansi nilai Pancasila | Product (hasil dan dampak program)                |
| Kualitas fasilitator dan metode | Kompetensi narasumber, kejelasan materi, kenyamanan belajar     | Input (sumber daya, strategi, kualitas pelaksana) |
| Dampak sosial dan perilaku      | Toleransi, semangat kebangsaan, kepedulian sosial               | Product (hasil sosial dan perubahan perilaku)     |
| Kepuasan dan keberlanjutan      | Persepsi terhadap kinerja BPIP, harapan keberlanjutan           | Product (hasil jangka panjang dan keberlanjutan)  |

Sumber: Dataset BPIP, 2025.

Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai tingkat efektivitas pembudayaan ideologi Pancasila, termasuk kekuatan dan kelemahan dari berbagai inisiatif yang dilaksanakan.

Dalam analisis data, digunakan pendekatan deskriptif dengan penghitungan persentase tingkat persetujuan responden terhadap setiap pernyataan. Skoring menggunakan skala Likert 1–5, dari "Sangat Tidak Setuju" sampai "Sangat Setuju", yang kemudian dikonversi menjadi indeks efektivitas dengan rentang 0–100 menggunakan rumus:

$$\text{Indeks} = \frac{\text{Skor rata-rata} - \text{Skor minimum}}{\text{Skor maksimum} - \text{Skor minimum}} \times 100$$

Dengan demikian, jika skor rata-rata responden adalah 4, maka indeks dihitung sebagai:

$$\text{Indeks} = \frac{(4-1) \times 100}{(5-1)} = 75$$

Rumus ini memastikan bahwa setiap skor Likert dapat dipetakan secara proporsional ke dalam skala 0–100, sehingga hasil analisis lebih mudah dibandingkan antar dimensi dan indikator.

Hasil analisis disajikan dalam bentuk diagram batang dan peta sebaran provinsi, sehingga dapat memperlihatkan capaian secara regional dan mengidentifikasi disparitas antar daerah. Validitas isi kuesioner diuji melalui uji pakar, sementara reliabilitasnya dilakukan dengan uji konsistensi internal menggunakan Cronbach's Alpha untuk memastikan instrumen dapat

menghasilkan data yang stabil dan reliabel.

Cronbach’s Alpha adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menguji reliabilitas atau konsistensi internal dari suatu instrumen penelitian, khususnya kuesioner yang terdiri dari beberapa item atau pernyataan yang mengukur satu konsep atau variabel (Cronbach, 1951; Streiner, 2003; Tavakol & Dennick, 2011).

Dari segi etika, semua data responden dijaga kerahasiaannya sesuai protokol BPIP, dan partisipasi responden dilakukan secara sukarela setelah mendapatkan persetujuan yang jelas dan diinformasikan secara transparan.

Berikut rekap data capaian pengumpulan data di 18 provinsi di Indonesia:

**Tabel 2.** Data Provinsi Lokasi Pengumpulan Data

| No    | Provinsi                  | Jumlah Responden |
|-------|---------------------------|------------------|
| 1.    | Sumatera Utara            | 945              |
| 2.    | Jawa Tengah               | 659              |
| 3.    | Kepulauan Bangka Belitung | 467              |
| 4.    | Nusa Tenggara Timur       | 420              |
| 5.    | Sumatera Barat            | 406              |
| 6.    | Kalimantan Selatan        | 377              |
| 7.    | Aceh                      | 356              |
| 8.    | Jawa Barat                | 344              |
| 9.    | Banten                    | 271              |
| 10.   | Kalimantan Barat          | 250              |
| 11.   | Sulawesi Selatan          | 205              |
| 12.   | Sumatera Selatan          | 169              |
| 13.   | Jawa Timur                | 143              |
| 14.   | Jambi                     | 140              |
| 15.   | Riau                      | 134              |
| 16.   | Papua Selatan             | 34               |
| 17.   | DKI Jakarta               | 22               |
| 18.   | DI Yogyakarta             | 14               |
| Total |                           | 5.356            |

Sumber: Laporan Interim BPIP (2025: 8)

Jumlah total responden mencapai 5.356, mencerminkan keragaman dan keterwakilan suara dari berbagai provinsi dalam evaluasi efektivitas pembinaan ideologi Pancasila di seluruh nusantara. Berikut gambaran data Demografi Responden;

**Tabel 3.** Demografi Responden berdasarkan Sebaran Kabupaten/Kota

| Wilayah/Provinsi          | Jumlah Responden (n) | Kota/Kabupaten Utama          | Catatan Partisipasi                              |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Sumatera Utara            | 945                  | Medan, Deli Serdang, Langkat  | Partisipasi tertinggi nasional                   |
| Jawa Tengah               | 659                  | Semarang, Magelang, Banyumas  | Kontributor besar dari Pulau Jawa                |
| Nusa Tenggara Timur (NTT) | 420                  | Ngada, Sikka, Sumba Timur     | Representasi kuat dari wilayah timur             |
| Kep. Bangka Belitung      | 467                  | Pangkal Pinang, Bangka Tengah | Partisipasi tinggi dari wilayah kepulauan        |
| Kalimantan Selatan        | 377                  | Banjarnegara, Banjarmasin     | Partisipasi signifikan dari Kalimantan           |
| Sumatera Barat            | 406                  | Padang, Agam, Tanah Datar     | Keterlibatan aktif dari daerah pendidikan        |
| Aceh                      | 356                  | Banda Aceh, Aceh Besar        | Partisipasi kuat dari wilayah barat              |
| Jawa Barat                | 344                  | Tasikmalaya, Garut, Sukabumi  | Partisipasi tinggi dari daerah pendidikan        |
| Sulawesi Selatan          | 205                  | Makassar, Gowa                | Representasi dari wilayah tengah                 |
| Kalimantan Barat          | 250                  | Ketapang, Bengkayang          | Partisipasi dari wilayah perbatasan              |
| Banten                    | 271                  | Tangerang, Serang             | Wilayah urban dengan partisipasi tinggi          |
| Sumatera Selatan          | 169                  | Lubuk Linggau, Musi Rawas     | Partisipasi moderat dari Sumatera bagian selatan |
| Jawa Timur                | 143                  | Pasuruan, Blitar              | Partisipasi dari daerah industri                 |
| Jambi                     | 140                  | Batanghari                    | Partisipasi terbatas namun merata                |
| Riau                      | 134                  | Indragiri Hulu                | Partisipasi dari daerah pesisir                  |
| DKI Jakarta               | 22                   | Jakarta Pusat, Selatan        | Partisipasi rendah, dominan urban                |
| Yogyakarta                | 14                   | Sleman, Kota Yogyakarta       | Partisipasi simbolik dari pusat pendidikan       |
| Papua Selatan             | 34                   | Merauke                       | Representasi dari ujung timur Indonesia          |

Sumber: Laporan Interim BPIP (2025;12)

**Tabel 4.** Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan dan Pekerjaan.

| Kategori        | Distribusi Utama                                                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sebaran Wilayah | 18 provinsi, 125 kabupaten/kota; terbesar: Sumatera Utara (945), Jawa Tengah (659), NTT (420) |
| Jenis Kelamin   | Perempuan 53,32% ; Laki-laki 46,77%                                                           |
| Usia            | 19–24 tahun 36,62% ; 25–34 tahun 20,57%                                                       |
| Pendidikan      | SLTA/SMA 54,46% ; Sarjana/Diploma 29,56%; Pascasarjana 3,31%                                  |
| Pekerjaan       | Pelajar/Mahasiswa 34,75% ; Wirasaha 24,82% ; Karyawan Swasta 20,36%                           |

Sumber: Laporan Interim BPIP (2025;11)

Penelitian yang melibatkan 5.356 responden dari 125 kabupaten/kota di 18

provinsi, dengan distribusi terbesar di Sumatera Utara (945), Jawa Tengah (659), dan Nusa Tenggara Timur (420). Komposisi responden menunjukkan dominasi perempuan (53,32%) dan mayoritas berusia 19–24 tahun (36,62%). Dari segi pendidikan, sebagian besar lulusan SLTA/SMA (54,46%), sementara dari sisi pekerjaan, pelajar/mahasiswa mendominasi dengan 34,75%. Fakta dominasi kelompok muda ini sangat relevan dengan isu gap digital yang dibahas di pendahuluan, karena mereka merupakan pengguna utama media sosial sekaligus arena penting pembentukan kewarganegaraan digital.

### **Analisa Data**

Dalam menganalisis efektivitas kebudayaan pembinaan ideologi Pancasila tahun 2025, teori evaluasi program yang relevan adalah Model CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam (D. L., Stufflebeam & Coryn, 2014; D. L. Stufflebeam & Thomas Kellaghan, 2003). Menurut Stufflebeam & Thomas Kellaghan (2003:3-20, 2014:45-62), model ini merupakan pendekatan komprehensif yang dirancang khusus untuk mengevaluasi program pendidikan dan kebijakan publik secara menyeluruh.

Konsep utama dari model CIPP adalah bahwa evaluasi harus bersifat decision-oriented, yakni diarahkan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat guna meningkatkan efektivitas program.

Model CIPP terdiri dari empat komponen utama yang saling terkait dan berfungsi dalam menilai berbagai aspek dari sebuah program. Pertama, konteks (Context) menilai kebutuhan, masalah, dan peluang yang melatarbelakangi dilaksanakan program pembinaan ideologi Pancasila. Pada tahap ini, dilakukan analisis terhadap kesiapan, relevansi, dan urgensi program dalam konteks sosial, budaya, dan politik saat ini, sehingga program dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Kedua, Input menilai strategi, rencana, dan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan program, termasuk metodologi, tenaga fasilitator, serta infrastruktur yang tersedia. Dalam penelitian ini, aspek Input secara khusus menyoroti strategi komunikasi digital BPIP sebagai variabel kunci. Hal ini mencakup pemanfaatan media sosial, kanal resmi, dan pendekatan *digital citizenship* untuk menjangkau generasi muda. Dengan demikian, analisis Input tidak hanya menilai kualitas sumber daya

manusia dan materi, tetapi juga efektivitas strategi digital dalam menginternalisasikan nilai Pancasila. Aspek ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya dimanfaatkan secara optimal agar tujuan pembinaan Pancasila dapat tercapai secara efektif.

Ketiga, Process akan memantau jalannya kegiatan secara langsung, termasuk pelaksanaan metode pembelajaran, penggunaan teknologi, serta partisipasi peserta. Komponen ini memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai rencana dan mampu mengidentifikasi hambatan selama proses berlangsung. Terakhir, Product menilai hasil dan dampak dari program, seperti perubahan persepsi, pemahaman, dan sikap peserta terhadap nilai-nilai Pancasila, serta tingkat keberlanjutan dari internalisasi nilai tersebut.

Dengan menggunakan Model CIPP, evaluasi terhadap pembudayaan ideologi Pancasila tahun 2025 tidak hanya berfokus pada hasil akhir (outcome) tetapi juga mencakup seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan program. Pendekatan ini memungkinkan pengambil keputusan untuk melakukan penyesuaian strategis secara berkelanjutan dan memastikan bahwa program benar-benar memberikan

manfaat yang optimal sesuai kebutuhan dan konteks aktual masyarakat.

Referensi utama dari model ini oleh Stufflebeam (D. L., Stufflebeam & & Coryn, 2014; D. L. Stufflebeam & & Thomas Kellaghan, 2003) menegaskan bahwa keberhasilan sebuah program tidak semata-mata diukur dari hasil akhir, tetapi dari seluruh proses yang berlangsung, sehingga memungkinkan pengembangan program yang lebih adaptif dan relevan di masa depan.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil survei terhadap 5.356 responden dari 18 provinsi di Indonesia, diperoleh enam dimensi utama efektivitas pembudayaan pembinaan ideologi Pancasila (PIP) dengan indeks sebagai berikut:

| Tabel 5. Indeks Dimensi Efektivitas    |            |
|----------------------------------------|------------|
| Dimensi Efektivitas                    | Indeks (%) |
| Dampak Sosial (DS)                     | 86,31      |
| Fasilitator, Materi, dan Metode (FMM)  | 85,30      |
| Peningkatan Kapasitas (PK)             | 85,18      |
| Perubahan Perilaku (PP)                | 84,70      |
| Keterlibatan Kelompok Masyarakat (KKM) | 84,48      |
| Akses ke Sumber Informasi (ASI)        | 84,13      |
| Indeks Total Efektivitas               | 85,33      |

Sumber: Laporan Interim BPIP (2025)

## Temuan Kunci Perdimensi

Kajian ini menyajikan temuan-temuan kunci yang menggambarkan berbagai aspek efektivitas pelaksanaan program. Melalui pendekatan evaluatif dan analisis kuantitatif, hasil-hasil tersebut memberikan gambaran menyeluruh tentang tingkat partisipasi, akses informasi, peningkatan kapasitas, kualitas fasilitator, serta perubahan sosial dan perilaku peserta.

Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai temuan utama dari masing-masing dimensi yang telah dievaluasi;

1) Keterlibatan Kelompok Masyarakat (KKM); Lebih dari 80% responden menyatakan menunjukkan antusiasme yang tinggi dan aktif dalam mengikuti kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP), bahkan bersedia merekomendasikan kegiatan tersebut kepada orang lain. Tingkat partisipasi yang tinggi ini menunjukkan keberhasilan pendekatan berbasis komunitas dalam strategi pembudayaan Pancasila, di mana partisipasi aktif masyarakat menjadi indikator utama hasil riset bersifat independen dan reliabel dalam menciptakan keterlibatan sosial yang efektif. Hal ini menandakan bahwa pendekatan yang bersifat partisipasi

mampu meningkatkan *sense of ownership* dan komitmen masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila.

2) Akses ke Sumber Informasi (ASI); Meskipun 85% responden merasa mudah mengakses informasi terkait PIP, sebagian besar dari mereka masih lebih mengandalkan jalur non-media seperti organisasi dan relasi personal sebagai sumber utama informasi. Sementara itu, penggunaan kanal digital resmi BPIP, seperti media sosial dan website, masih tergolong rendah. Temuan ini menunjukkan adanya persoalan trust dan relevansi konten: responden lebih percaya informasi dari jaringan sosial atau komunitas yang mereka kenal dibanding kanal resmi, karena dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan dan pengalaman mereka. Fenomena ini sejalan dengan teori *Digital Citizenship* (Mossberger et al., 2007) di mana perilaku warga digital ditentukan oleh preferensi interaksi dan kepercayaan terhadap sumber informasi. Selain itu, pola ini juga dapat dijelaskan melalui konsep *Echo Chambers* (Auxier & Vitak, 2019), yakni kecenderungan individu untuk mencari dan mempercayai informasi dari lingkaran sosial yang homogen, sehingga kanal resmi kurang

mendapat perhatian. Dengan demikian, strategi digital BPIP perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan literasi digital, tetapi juga pada pembangunan kepercayaan dan relevansi konten agar mampu menembus ekosistem informasi yang sudah terbentuk di ruang digital.

3) Peningkatan Kapasitas (PK); Sekitar 90% responden menyatakan bahwa mereka mengalami peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila setelah mengikuti berbagai kegiatan pembinaan. Selain itu, mereka melihat bahwa nilai Pancasila tetap relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan bahwa program berhasil memperkuat aspek internalisasi dan pemahaman akan pentingnya nilai-nilai tersebut dalam membangun karakter dan moral bangsa. Ini menandai keberhasilan aspek peningkatan kapasitas sebagai bagian kunci dari pembinaan yang efektif.

4) Fasilitator, Materi, dan Metode (FMM): Fasilitator yang terlibat dalam kegiatan dinilai sangat kompeten, mampu menyampaikan materi secara menarik (menggunakan contoh kasus dan gaya humor) dan mudah dipahami. Materi

yang disampaikan juga dianggap relevan dan disajikan dengan metode yang efektif, sehingga memudahkan peserta dalam memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Selain itu, lingkungan kegiatan yang kondusif juga mendukung proses pembelajaran, memperkuat pengalaman peserta dalam mengikuti program, dan menegaskan pentingnya kualitas fasilitator dan metode dalam keberhasilan pembinaan.

5) Dampak Sosial (DS); Dimensi dampak sosial menunjukkan hasil yang sangat positif, dengan penilaian bahwa kegiatan PIP berhasil meningkatkan toleransi, rasa persatuan, dan keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nilai tertinggi diperoleh pada indeks dampak sosial mencapai 86,31%, mengindikasikan bahwa program secara efektif memperkuat solidaritas sosial dan memperdalam rasa kebangsaan di kalangan peserta. Temuan ini menegaskan bahwa aspek sosial merupakan indikator utama keberhasilan dalam membumikan nilai-nilai Pancasila secara kolektif.

6) Perubahan Perilaku (PP); Responden menunjukkan peningkatan motivasi untuk mempraktikkan nilai-nilai

Pancasila, seperti gotong royong, cinta tanah air, dan kepedulian sosial, sebagai hasil langsung dari partisipasi dalam kegiatan pembinaan. Perubahan ini menandakan bahwa program tidak hanya mempengaruhi pemahaman kognitif tetapi juga mampu mengubah sikap dan perilaku secara nyata, memperlihatkan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila mampu tercermin dalam tindakan sehari-hari peserta.

### **Analisa dan Diskusi**

Analisis efektivitas pembudayaan pembinaan ideologi Pancasila dalam kajian "Efektivitas Pembudayaan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025" dapat dibedah secara komprehensif menggunakan Model CIPP (Context, Input, Process, Product) oleh Daniel L. Stufflebeam (2003, 2014). Model ini menekankan evaluasi yang berorientasi pada pengambilan keputusan, sehingga hasil analisis tidak hanya menunjukkan capaian, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan dan pengembangan program.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun akses informasi terkait PIP relatif mudah, kanal digital resmi BPIP

belum menjadi sumber utama bagi mayoritas responden. Hal ini berbeda dengan temuan Wulansari (2025) yang menekankan rendahnya literasi digital sebagai faktor utama keterbatasan partisipasi daring. Penelitian ini justru mengindikasikan bahwa masalah utama bukan sekadar literasi, melainkan trust dan relevansi konten: responden lebih percaya informasi dari organisasi atau relasi personal dibandingkan dengan kanal resmi.

Selain itu, hasil ini memperkuat kajian Mossberger et al. (2007) tentang Digital Citizenship, yang menekankan bahwa partisipasi digital tidak hanya bergantung pada akses, tetapi juga pada kualitas interaksi dan kepercayaan terhadap sumber informasi. Fenomena ini juga sejalan dengan konsep Echo Chambers (Auxier & Vitak, 2019), di mana individu cenderung mencari dan mempercayai informasi dari lingkaran sosial yang homogen, sehingga kanal resmi sulit menembus preferensi komunikasi yang sudah terbentuk.

Implikasinya, strategi komunikasi BPIP perlu diarahkan pada penguatan relevansi konten digital dan pembangunan kepercayaan publik. Model CIPP tidak hanya menilai input berupa sumber daya manusia dan materi,

tetapi juga menekankan strategi digital sebagai komponen krusial dalam pembinaan ideologi Pancasila.

### **Implikasi Teoretis dan Praktis**

Analisis Model CIPP mengungkapkan bahwa program pembinaan ideologi Pancasila pada tahun 2025 memiliki konteks (*Context*) yang kuat dan sangat relevan, serta menunjukkan Proses (*Process*) dan hasil (*Product*) yang efektif. Program ini berhasil melibatkan masyarakat, menyampaikan materi dengan baik, dan menghasilkan peningkatan pengetahuan, dampak sosial positif, serta motivasi perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Meski demikian, masih terdapat celah signifikan pada komponen input terkait strategi komunikasi digital BPIP. Hasil (*Product*) sangat baik di antara peserta yang sudah terlibat. Data input menunjukkan bahwa BPIP belum optimal dalam memanfaatkan kanal digital untuk menjangkau audiens secara luas pada tahap awal (*awareness*). Ini menciptakan tantangan dalam skala dan efisiensi program.

Implikasi untuk Pengambilan Keputusan (*Decision-Oriented Evaluation*). Berdasarkan analisis CIPP ini, BPIP dapat

mengambil keputusan strategis sebagai berikut:

- 1) Mempertahankan dan memperkuat proses yang sudah efektif: Kualitas fasilitator, materi, dan metode pembelajaran harus terus dijaga dan dikembangkan. Aspek ini adalah kekuatan inti program yang menghasilkan dampak positif.
- 2) Mengoptimalkan Strategi Input Digital: BPIP perlu mengalokasikan sumber daya lebih besar untuk mengembangkan strategi komunikasi dan konten yang menarik serta adaptif di platform media sosial yang dominan digunakan responden.
- 3) Menjembatani Kesenjangan Awareness Awal: BPIP dapat memanfaatkan jaringan "Organisasi" dan "Teman/Kolega" yang sudah kuat untuk mempromosikan kanal digital resminya. Misalnya, memberikan pelatihan literasi digital kepada para relawan agar mereka juga dapat menjadi digital ambassador bagi BPIP.
- 4) Memperluas Skala Program: Mengingat tingginya efektivitas program pada komponen Process dan Product, BPIP dapat mempertimbangkan untuk memperluas jangkauan program,



dengan mengacu pada temuan konteks (Context) yang menunjukkan relevansi nasional. Namun, ekspansi ini harus dibarengi dengan perbaikan strategis pada Input digital agar skala dapat dicapai secara efisien.

Dengan demikian, Model CIPP tidak hanya mengidentifikasi hasil riset bersifat independen dan reliabel, tetapi juga memberikan peta jalan yang jelas untuk perbaikan berkelanjutan, khususnya dalam mengadaptasi strategi komunikasi di era digital tanpa mengorbankan kekuatan yang sudah ada pada pelaksanaan program.

### **Kesimpulan, Rekomendasi, dan Pembatasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2025 memiliki efektivitas yang sangat tinggi dengan indeks total 85,33%. Dimensi dampak sosial, kualitas fasilitator, peningkatan kapasitas, serta keterlibatan masyarakat menunjukkan capaian signifikan yang menegaskan relevansi program dalam memperkuat nilai toleransi, persatuan, dan semangat kebangsaan di era digital.

Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi utama adalah perlunya optimalisasi strategi komunikasi digital

BPPIP agar lebih adaptif terhadap preferensi platform masyarakat. Hal ini mencakup pemanfaatan ekosistem algoritma media sosial untuk memperluas jangkauan pesan ideologi Pancasila, sekaligus memperkuat kedaulatan digital Indonesia. Dengan strategi ini, nilai-nilai Pancasila dapat lebih efektif diinternalisasi dalam praktik kewarganegaraan digital yang sehat dan inklusif.

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan metodologis. Pendekatan deskriptif kuantitatif berbasis persepsi responden tidak memungkinkan penarikan kesimpulan kausalitas yang kuat. Selain itu, cakupan wilayah terbatas pada 18 provinsi, sehingga generalisasi nasional tetap memiliki batas tertentu. Instrumen kuesioner juga memiliki keterbatasan dalam menangkap dinamika kualitas konten digital dan interaksi algoritmik secara lebih mendalam. Meskipun hasil penelitian ini memberikan dasar empiris yang kuat bagi pengambilan keputusan strategis, diperlukan evaluasi berkelanjutan dan studi lanjutan seperti metode campuran (*mix method*) yang lebih mendalam untuk memperkuat efektivitas pembudayaan ideologi Pancasila di tengah perubahan sosial-teknologi.

## Daftar Pustaka

- Amir, I., Nursalam, N., & Mustafa, I. (2022). Tantangan Implementasi Nilai-Nilai Profil Pelajar Pancasila dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia pada Kurikulum Merdeka Belajar. *GHANCARAN: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 204–215. <https://doi.org/10.19105/ghancaran.vi.7587>
- Ardiana Bulan Ramadhani, Fibri Nur Halizah, Hellya Untari, Maurilla Shafaa Anggraini, Meilina Ayu Kristina, & Ari Metalin Ika Puspita. (2024). Transformasi Pancasila Di Era Digital: Peluang Dan Tantangan. *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 2(3), 153–157. <https://doi.org/10.55606/lencana.v2i3.3757>
- Ariwinata, Y., & Ofianto, O. (2025). Menarik Akar Sejarah Pendidikan Indonesia: Pancasila sebagai Fondasi Pembentukan Karakter Bangsa di Era Kontemporer. *TSAQOFAH*, 5(4), 3579–3591. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v5i4.6400>
- Auxier, B. E., & Vitak, J. (2019). Factors motivating customization and echo chamber creation within digital news environments. *Social media+ society*, 5(2), 2056305119847506.
- Caturiasari, J., Mulyani, S., & Mahdarani, N. (2022). Internalization of Pancasila Values in the Tradition of the Serang Party. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220108.108>
- Cronbach, L. J. (1951). Coefficient Alpha and the Internal Structure of Tests. *Psychometrika*, 16(3), 297–334. <https://doi.org/10.1007/BF02310555>
- Dewantara, J. A., Suhendar, I. F., Rosyid, R., & Atmaja, T. S. (2019). Pancasila as Ideology and Characteristics Civic Education in Indonesia. *International Journal for Educational and Vocational Studies*, 1(5). <https://doi.org/10.29103/ijevs.v1i5.1617>
- Dewi, A. (2024). Implementation Of Pancasila in The Digital Era. *jurnal SETIA PANCASILA*, 4(2), 49–58. <https://doi.org/10.36379/jsp.v4i2.464>
- Emmerich, N. (2015). Bourdieu's collective enterprise of inculcation: the moral socialisation and ethical enculturation of medical students. *British Journal of Sociology of Education*, 36(7), 1054–1072. <https://doi.org/10.1080/01425692.2014.886939>
- Ganjar Razuni, & Paisal Halim. (2024). Revitalizing Pancasila Ideology in Post-Reform Indonesia: An Analysis of Presidential Decree No. 24 of 2016. *Evolutionary Studies In Imaginative Culture*, 1591–1597. <https://doi.org/10.70082/esiculture.vi.1484>
- Ihsan, I., & Fatah, A. (2021). Pancasila and Islamic Education: The Deradicalization Model of Madrasahs Based on Islamic Boarding Schools in Central Java. *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)*, 9(1), 245. <https://doi.org/10.21043/qijis.v9i1.8941>
- Indratmoko, J. A., Ali, A. Z., & Cahyono, A. E. (2025). Building The Profile of Pancasila Students Through a Tolerance Learning Project: A Case Study in Sukowono Village as a Pancasila Village from a Global. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil*

Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran, 11(2), 654. <https://doi.org/10.33394/jk.v1i2.13316>

Jurgen R. Litualy, & Andreas M D. Ratuanak. (2024). Pancasila sebagai Landasan Ideologis bagi Pengembangan Keilmuan pada Komunitas Akademik di Indonesia dan Tantangan Globalisasi. *Sosial: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 2(2), 281–294. <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i2.333>

Khaedir Hedir, M., & Nurdyanti, A. (2025). Cultural Diversity in Pancasila Philosophy: A Contribution for Social and National Identity Awareness. *Pelita: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 24(2), 19–32. <https://doi.org/10.33592/pelita.v24i2.6276>

Kurniasih, N., & Wakhudin, W. (2023). Internalisasi Profil Pelajar Pancasila Melalui Pembelajaran Seni dan Budaya di Sekolah Dasar. *Tematik: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar*, 2(1), 80–90. <https://doi.org/10.57251/tem.v2i1.1062>

Latif, Y. (2018). The Religiosity, Nationality, and Sociality of Pancasila: Toward Pancasila through Soekarno's Way. *Studia Islamika*, 25(2), 207–245. <https://doi.org/10.15408/sdi.v25i2.7502>

Lizardo, O. (2021). Culture, Cognition, and Internalization. *Sociological Forum*, 36(S1), 1177–1206. <https://doi.org/10.1111/socf.12771>

Loppies, I. J., Arlin, A., & Syamsul, S. (2025). Education And the Influence of Ideology In Society (Examining

Max Horkheimer's Theory Of Education In The Contemporary Social Context). *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak*, 20(1), 61–68. <https://doi.org/10.52049/gemakampus.v20i1.466>

Maulida, S. Z., Xavier, M., & Elliot, M. (2023). The Essence of Pancasila as the Foundation and Ideology of the State: The Values of Pancasila. *International Journal of Educational Narratives*, 1(2), 84–92. <https://doi.org/10.55849/ijen.v1i2.303>

Mochammad Daffa Dzakwan Setiawan, Shafia Zahra, Indra Trinanda Darmawan, Raka Putra, & Herli Antoni. (2025). Peran Pendidikan Pancasila dalam Menanamkan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Mengatasi Dekadensi Moral di Kalangan Generasi-Z pada Era Digital. *Journal of Student Research*, 3(3), 43–54. <https://doi.org/10.55606/jsr.v3i1.3610>

Mossberger, K., Tolbert, C. J., & McNeal, R. S. (2007). *Digital citizenship: The Internet, society, and participation*. MIT Press.

Mujahidah, I., & Dewi, D. A. (2022). Internalisasi Nilai Pancasila Terhadap Generasi Muda Sebagai Wujud Mempertahankan Budaya Bangsa. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 13(2), 431. <https://doi.org/10.26418/jpsh.v13i2.54773>

Nurizka, R., Irawan, R., Sakti, S. A., & Hidayat, L. (2020). Internalization of School Culture to Foster Awareness of Pancasila Values in Elementary School Students. *Universal Journal of Educational Research*, 8(10), 4818–4825.

- <https://doi.org/10.13189/ujer.2020.081053>
- Princessa Dinda Oktaviana, Fathurrohman, Sekar Purbarini Kawuryan, & Bambang Saptono. (2023). Implementation of Pancasila Values in Civics Learning in the Digital Era. *MIMBAR PGSD Undiksha*, 11(3), 384–395. <https://doi.org/10.23887/jjpgsd.v11i3.61880>
- Pudjiastuti, S. R. (2020). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mencegah Paham Radikal. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 19(02), 32–39. <https://doi.org/10.21009/jimd.v19i02.14788>
- Santoso, A. J., Harto, K., & Oviyanti, F. (2025). Integrating Pancasila Student Profile Values into Islamic Religious Education at Sekolah Penggerak. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 17(1). <https://doi.org/10.35445/alishlah.v17i1.6741>
- Sartika, R., Praja, W. N., & Azis, A. (2022). Sustainable development goals: Recognition of Pancasila education materials in shaping student ethics in the digital era. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(2), 303–309. <https://doi.org/10.21831/jc.v19i2.48285>
- Septiani, B. D., & Kurniawan, Moh. W. (2022). Internalization Of Pancasila Values Based on School Culture. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 7(3), 486–501. <https://doi.org/10.26618/jed.v7i3.8107>
- Setiyono, J., & Natalis, A. (2023). Universal Values of Pancasila in Managing the Crime of Terrorism. *Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal*, 15(2), 48–63. <https://doi.org/10.5130/ccs.v15.i2.8084>
- Silalahi, R. M., & Yuwono, U. (2018). The Sustainability of Pancasila in Indonesian Education System. *Research in Social Sciences and Technology*, 3(2), 58–78. <https://doi.org/10.46303/ressat.03.02.4>
- Streiner, D. L. (2003). Starting at the Beginning: An Introduction to Coefficient Alpha and Internal Consistency. *Journal of Personality Assessment*, 80(1), 99–103. [https://doi.org/10.1207/S15327752JP.A8001\\_18](https://doi.org/10.1207/S15327752JP.A8001_18)
- Stufflebeam, D. L. & Thomas Kellaghan (2003). *International Handbook of Educational Evaluation* (T. Kellaghan & D. L. Stufflebeam, Eds.). Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/978-94-010-0309-4>
- Stufflebeam, D. L. , & Coryn. C. L. (2014). *Evaluation theory, models, and applications*. John Wiley & Sons.
- Susilawati, E., Sarifudin, S., & Muslim, S. (2021). Internalisasi Nilai Pancasila Dalam Pembelajaran Melalui Penerapan Profil Pelajar Pancasila Berbantuan Platform Merdeka Mengajar. *Jurnal Teknodik*, 155–167. <https://doi.org/10.32550/teknodik.v25i2.897>
- Syahwaliana, K., Habib, T. A., Shofiyah, S. N. A., & Oki, S. (2025). Integrasi Nilai Pancasila dalam Pembentukan Civic Disposition Melalui Pendidikan Pancasila: Systematic Literature Review. *Jurnal Kewarganegaraan*, 22(1), 76–88. <https://doi.org/10.24114/jk.v22i1.64360>

- Tasya Salsabilah Efendi, Nazwa Dwi Savitri, Azenia Lisani Putri, Dinda Puspita Sari, Rafli Annaufal, & Yoan Abdul Ghani. (2025). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Era Digital. *Jurnal Riset Manajemen*, 3(1), 130–138.  
<https://doi.org/10.54066/jurma.v3i1.2973>
- Tavakol, M., & Dennick, R. (2011). Making sense of Cronbach's alpha. *International Journal of Medical Education*, 2, 53–55.  
<https://doi.org/10.5116/ijme.4dfb.8dfd>
- Toomela, A. (1996). How Culture Transforms Mind: A Process of Internalization. *Culture & Psychology*, 2(3), 285–305.  
<https://doi.org/10.1177/1354067X9600200305>
- Vehrer, A. (2024). Concept of Enculturation in a Multidisciplinary Approach. *Acta Cultura et Paedagogicae*, 3(1), 26–40.  
<https://doi.org/10.15170/ACEP.2023.01.02>
- Vindevoghel, L. J. (2016). Power, Identity, and the Construction of Knowledge in Education. *In Education*, 22(2), 87–97.  
<https://doi.org/10.37119/ojs2016.v22i2.308>
- Yani, M. T., Ahmadi, A., Hazin, M., Akmal, M. H., & Nasih, A. M. (2025). Significance of preventing radicalism among students through strengthening religiousness and Pancasila ideology in Indonesia. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 9(4), 2413–2423.  
<https://doi.org/10.55214/25768484.v9i4.6580>
- ZA, T., Walidin, W., Idris, S., & Huda, M. (2024). Pancasila as the Core Value for Character Building in Islamic Higher Education Institutions. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 12(2), 565–592.  
<https://doi.org/10.26811/peuradeun.v12i2.1212>